



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN BARU DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memasuki Tahun Pelajaran Baru yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, mudah, lancar dan tersalurnya semua calon peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama Tahun Pelajaran Baru di Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, Pendidikan

Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN BARU DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan pendidikan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

7. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
10. Daya Tampung atau Kuota adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
11. Jalur Zonasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
12. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
13. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orangtua/wali dipindah tugaskan.
14. Jalur Prestasi Akumulasi Nilai Rapor adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa jumlah nilai rapor lima semester terakhir untuk mata pelajaran Kelompok A, Kelompok B dan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda.
15. Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan di Bidang Akademik Maupun Non Akademik adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan/atau Tingkat Kabupaten dan calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa/keterampilan khusus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dinas Pendidikan.
16. Jalur Mandiri adalah jalur yang diperuntukan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Program Paket A, Paket B dan Paket C.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
24. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.

25. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
26. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.
27. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
28. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari satuan pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh Ujian Sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
31. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
32. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Sistem Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang telah ditetapkan oleh Bupati.
34. Kuota Zonasi adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.

35. Kuota Afirmasi adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
36. Kuota Perpindahan Tugas Orang tua/Wali adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan perpindahan tugas orang tua/wali.
37. Kuota Prestasi adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir semua mata pelajaran Kelompok A, Kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda serta hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan/atau Tingkat Kabupaten.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Prinsip PPDB

Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur :
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi.
- (2) Selain jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 (satu), satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan PPDB jalur mandiri.

Pasal 4

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada zona yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Zona yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona SD dan SMP yang memuat daftar Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Zona yang dimaksud pada ayat (2) untuk jenjang SD berbasis wilayah desa/kelurahan dan untuk jenjang SMP berbasis wilayah kecamatan.
- (4) Calon peserta didik di perbatasan zona desa/kelurahan untuk jenjang SD dan zona kecamatan untuk jenjang SMP diperbolehkan mendaftar keluar zonasinya dengan ketentuan jarak domisili calon peserta didik ke Satuan Pendidikan di luar zonasinya lebih dekat daripada Satuan Pendidikan yang berada di zonasinya.
- (5) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten maka sekolah tersebut dapat menerima pendaftar calon peserta didik dari luar kabupaten jika tempat tinggalnya lebih dekat ke Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik jalur zonasi hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dan jalur afirmasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik kuota jalur zonasi:
 - a. 100% (seratus persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk PPDB TK;
 - b. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk PPDB SD; dan

- c. paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk PPDB SMP.
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (3) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- (5) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon peserta didik
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. KK hilang atau rusak.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- (7) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh anggota keluarga yang tercantum pada KK tersebut.
- (8) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- (9) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

- (10) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah untuk PPDB SD dan SMP.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih dari daya tampung sekolah untuk PPDB SD dan SMP.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. Penyandang disabilitas.
- (4) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan peserta didik yang berdomisili di kelurahan/desa sekolah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik yang masuk kedalam kuota dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;

- b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial; atau
 - c. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (3) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
- a. Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. Surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan Untuk anak guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali mengajar/sebagai tenaga kependidikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk PPDB SD dan SMP.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- a. Instansi;
 - b. Lembaga;
 - c. Kantor; dan
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi yang mendapatkan penugasan antar Kabupaten dan Provinsi.

- (4) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menerima calon peserta didik Kuota jalur prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk PPDB SMP.
- (2) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan ditentukan berdasarkan:
 - a. Akumulasi nilai rapor berdasarkan jumlah nilai rapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan/atau
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik dan yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa/keterampilan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dinas Pendidikan.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir semua mata pelajaran Kelompok A, Kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda yang terdata pada Dapodik.
- (4) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - a. Sains;
 - b. Teknologi;
 - c. Riset; dan/atau
 - d. Inovasi
- (5) Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya; dan/atau olahraga tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga
- (6) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan Pasal (5) memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Minimal pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - b. Dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).
- (7) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e. Lembaga Lainnya.
- (8) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (9) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- (10) Pemerintah Daerah menetapkan poin atas prestasi berdasarkan Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (11) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam seleksi jalur prestasi, Satuan Pendidikan memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman <https://simt.kemdikbud.go.id> atau <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/> terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Lainnya.
- (13) Satuan pendidikan dapat melakukan verifikasi lanjutan atas jalur prestasi calon peserta didik.

Pasal 11

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Satuan Pendidikan diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik dengan memperhatikan

ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 12

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat melaksanakan PPDB pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.

Pasal 13

Sosialisasi PPDB oleh Dinas Pendidikan dilakukan mulai bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan April pada tahun PPDB dilaksanakan..

Pasal 14

Pelaksanaan waktu PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat jenjang PAUD, SD, dan SMP diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk pembelian seragam atau buku tertentu yang berkaitan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan wajib mengumumkan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
- b. tanggal pendaftaran;
- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi dan/atau jalur mandiri;
- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 17

- (1) PPDB Taman Kanak-Kanak dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*).
- (2) PPDB SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (3) PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (4) Apabila terjadi kendala atau gangguan pada sistem PPDB *online* saat pendaftaran PPDB SD dan SMP, maka pendaftaran PPDB dapat dilakukan secara *luring*.

Pasal 18

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran melalui sistem PPDB *online* ke Satuan Pendidikan yang dituju secara individual.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan umum pendaftaran PPDB TK, yaitu calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- (1) Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- (2) Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 20

Persyaratan umum pendaftaran PPDB SD sebagai berikut:

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada satuan Pendidikan.
- (4) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. Kesiapan psikis.
- (5) Calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan telah tertampung sepenuhnya pada Satuan Pendidikan.
- (6) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (7) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 21

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- (1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- (2) Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 22

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, pasal 21 dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada pasal 19, pasal 20, pasal 21 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- (3) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (4) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dibuktikan dengan:
 - a. Ijazah; atau
 - b. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas kecuialikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. Batas usia; dan
 - b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 24

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 23, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 25

Ketentuan seleksi PPDB pada jenjang SD sebagai berikut:

- (1) Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Usia; dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

Ketentuan seleksi PPDB pada SMP sebagai berikut:

- (1) Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan

jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah Pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi akumulasi nilai raport berdasarkan jumlah nilai rapor lima semester terakhir semua mata pelajaran kelompok A, kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda yang terdata pada dapodik.
- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi akumulasi nilai rapor tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan jumlah nilai Raport lima semester terakhir untuk semua mata pelajaran kelompok A, kelompok B dan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi akademik dan non akademik dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan/penghargaan yang paling tinggi diperoleh calon peserta didik baru.
- (4) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi akademik dan non akademik tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Skor sertifikat kejuaraan/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Jika daya tampung untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali calon peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak terpenuhi, maka dilimpahkan ke jalur zonasi.
- (2) Jika daya tampung untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP tidak terpenuhi, maka dilimpahkan ke jalur zonasi.

Pasal 29

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke Satuan Pendidikan, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 30

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Satuan Pendidikan di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Keenam

Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 31

- (1) Hasil sementara PPDB diumumkan secara terbuka pada website PPDB, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada sistem PPDB sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.

Pasal 32

Hasil akhir PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melalui rapat Dewan Guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB menjadi peserta didik baru di sekolah masing-masing.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB diwajibkan daftar ulang ke Satuan Pendidikan yang menerima.
- (3) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB tidak melakukan daftar ulang di Satuan Pendidikan, maka pengisian kuota dilakukan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (4) Pada saat calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima melaksanakan daftar ulang maka Satuan Pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Peserta didik dilarang melakukan perpindahan antar Satuan Pendidikan dalam wilayah Kecamatan yang sama dalam waktu minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di luar wilayah Kecamatan, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan dapat dilakukan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala Satuan

Pendidikan yang dituju dengan menunjukkan dokumen dukung berupa pindah tugas dan/atau pindah domisili.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpindahan peserta didik ke Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang dikenakan pungutan dan/atau sumbangan.

Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Purwakarta setelah memenuhi:
 - a. Surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal;
 - b. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Peserta didik SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Purwakarta setelah:
 - a. Menyerahkan foto copy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
 - d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur nonformal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 38

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 39

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.

- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina Satuan Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah serta Lembaga Pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 40

- (1) Untuk mewujudkan prinsip PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat satuan pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten.

BAB V

SANKSI

Pasal 41

- (1) Peserta didik yang Orang tuanya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi dikeluarkan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah penyandang disabilitas.

Pasal 42

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Pasal 43

Kepala Dinas memberikan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat apabila melanggar pasal 11 berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian layanan dari dinas pendidikan;
- c. Pembekuan lembaga; dan
- d. Pencabutan ijin operasional

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 23 APRIL 2024

Pj BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
 KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN 2024 PELAJARAN BARU DI
 KABUPATEN PURWAKARTA

WILAYAH ZONASI JENJANG SEKOLAH DASAR

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
1	SDN 1 Babakancikao	Negeri	Babakancikao	Babakancikao
	SDN 2 Babakancikao	Negeri	Babakancikao	Babakancikao
2	SDN 1 Cicadas	Negeri	Cicadas	Babakancikao
	SDN 2 Cicadas	Negeri	Cicadas	Babakancikao
	SDS IT Risalatul Haq	Swasta	Cicadas	Babakancikao
3	SDN 1 Cigelam	Negeri	Cigelam	Babakancikao
	SDN 2 Cigelam	Negeri	Cigelam	Babakancikao
4	SD Plus Al Barokah	Swasta	Cilangkap	Babakancikao
	SDN 1 Cilangkap	Negeri	Cilangkap	Babakancikao
5	SDN 1 Ciwareng	Negeri	Ciwareng	Babakancikao
	SDN 2 Ciwareng	Negeri	Ciwareng	Babakancikao
	SDS IT Nurul Ihsan	Swasta	Ciwareng	Babakancikao
6	SDN 1 Hegarmanah	Negeri	Hegarmanah	Babakancikao

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SDN 2 Hegarmanah	Negeri	Hegarmanah	Babakancikao
7	SD Al-Maruf	Swasta	Kadumekar	Babakancikao
	SDN Kadumekar	Negeri	Kadumekar	Babakancikao
8	SDN Maracang	Negeri	Maracang	Babakancikao
9	SD Islam Al-Muhsin	Swasta	Mulyamekar	Babakancikao
	SD Plus Nurul Hidayah	Swasta	Mulyamekar	Babakancikao
	SDN 1 Mulyamekar	Negeri	Mulyamekar	Babakancikao
	SDN 2 Mulyamekar	Negeri	Mulyamekar	Babakancikao
	SDN 3 Mulyamekar	Negeri	Mulyamekar	Babakancikao
10	SDN 1 Bojong Timur	Negeri	Bojong Timur	Bojong
		Negeri	Bojong Barat	Bojong
	SDN 2 Bojong Timur	Negeri	Bojong Barat	Bojong
		Negeri	Bojong Timur	Bojong
11	SDN 1 Cibingbin	Negeri	Cibingbin	Bojong
	SDN 2 Cibingbin	Negeri	Cibingbin	Bojong
12	SDN Cihanjavar	Negeri	Cihanjavar	Bojong
13	SDN 1 Cikeris	Negeri	Cikeris	Bojong
	SDN 2 Cikeris	Negeri	Cikeris	Bojong

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
14	SDN Cileunca	Negeri	Cileunca	Bojong
15	SDN 1 Cipeundeuy	Negeri	Cipeundeuy	Bojong
	SDN 2 Cipeundeuy	Negeri	Cipeundeuy	Bojong
16	SDN 2 Kertasari	Negeri	Kertasari	Bojong
	SDN 1 Kertasari	Negeri	Kertasari	Bojong
17	SDN Pangkalan	Negeri	Pangkalan	Bojong
18	SDN1 Pasanggrahan	Negeri	Pasanggrahan	Bojong
19	SDN 2 Pawenang	Negeri	Pawenang	Bojong
	SDN 1 Pawenang	Negeri	Pawenang	Bojong
20	SD Negeri 3 Sindangpanon	Negeri	Sindangpanon	Bojong
	SDN 1 Sindangpanon	Negeri	Sindangpanon	Bojong
	SDN 2 Sindangpanon	Negeri	Sindangpanon	Bojong
21	SDN 1 Sindangsari	Negeri	Sindangsari	Bojong
	SDN 2 Sindangsari	Negeri	Sindangsari	Bojong
	SDS IT Al-Azhar	Swasta	Sindangsari	Bojong
22	SDN 1 Sukamanah	Negeri	Sukamanah	Bojong

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
23	SDN Bungursari	Negeri	Bungursari	Bungursari
24	SDN 1 Cibening	Negeri	Cibening	Bungursari
	SDN 2 Cibening	Negeri	Cibening	Bungursari
25	SDN 1 Cibodas	Negeri	Cibodas	Bungursari
	SDN 2 Cibodas	Negeri	Cibodas	Bungursari
26	SDN Cibungur	Negeri	Cibungur	Bungursari
27	SDN 1 Cikopo	Negeri	Cikopo	Bungursari
	SDN 2 Cikopo	Negeri	Cikopo	Bungursari
	SDN 3 Cikopo	Negeri	Cikopo	Bungursari
	SDN 4 Cikopo	Negeri	Cikopo	Bungursari
28	SDN Cinangka	Negeri	Cinangka	Bungursari
29	SDN Ciwangi	Negeri	Ciwangi	Bungursari
	SDs Tunas Pertiwi	Swasta	Ciwangi	Bungursari
30	SDN 1 Dangdeur	Negeri	Dangdeur	Bungursari
	SDN 2 Dangdeur	Negeri	Dangdeur	Bungursari
31	SDN Karangmukti	Negeri	Karangmukti	Bungursari
32	SDN Wanakerta	Negeri	Wanakerta	Bungursari
	SDs Tunas Bukit Indah	Swasta	Wanakerta	Bungursari

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
33	SD Alam Purwakarta	Swasta	Benteng	Campaka
	SD It Ar-Rahman	Swasta	Benteng	Campaka
	SDN Benteng	Negeri	Benteng	Campaka
34	SDN Campaka	Negeri	Campaka	Campaka
35	SDN 1 Campakasari	Negeri	Campakasari	Campaka
	SDN 2 Campakasari	Negeri	Campakasari	Campaka
	SD Negeri 3 Campakasari	Negeri	Campakasari	Campaka
36	SD Negeri Cijaya	Negeri	Cijaya	Campaka
	SD Plus Ar-Raudhah	Swasta	Cijaya	Campaka
37	SD Negeri 1 Cijunti	Negeri	Cijunti	Campaka
	SD Negeri 2 Cijunti	Negeri	Cijunti	Campaka
	SD Negeri 3 Cijunti	Negeri	Cijunti	Campaka
38	SD Negeri 1 Cikumpay	Negeri	Cikumpay	Campaka
	SD Negeri 2 Cikumpay	Negeri	Cikumpay	Campaka
39	SD Negeri 1 Cimahi	Negeri	Cimahi	Campaka
	SD Negeri 2 Cimahi	Negeri	Cimahi	Campaka

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SD Negeri 3 Cimahi	Negeri	Cimahi	Campaka
40	SD Negeri Cirende	Negeri	Cirende	Campaka
41	SDN Cisaat	Negeri	Cisaat	Campaka
42	SD Negeri 2 Kertamukti	Negeri	Kertamukti	Campaka
43	SD Negeri Cibatu	Negeri	Cibatu	Cibatu
44	SDN 1 Cibukamanah	Negeri	Cibukamanah	Cibatu
	SDN 2 Cibukamanah	Negeri	Cibukamanah	Cibatu
45	SD Negeri Cikadu	Negeri	Cikadu	Cibatu
46	SD Negeri 2 Cilandak	Negeri	Cilandak	Cibatu
	SDN 1 Cilandak	Negeri	Cilandak	Cibatu
	SDN 3 Cilandak	Negeri	Cilandak	Cibatu
47	SD Negeri Cipancur	Negeri	Cipancur	Cibatu
48	SDN Ciparungsari	Negeri	Ciparungsari	Cibatu
49	SD Negeri Cipinang	Negeri	Cipinang	Cibatu
	SDS IT Candra Buana	Swasta	Cipinang	Cibatu
50	SD Negeri 2 Cirangkong	Negeri	Cirangkong	Cibatu
	SDN 1 Cirangkong	Negeri	Cirangkong	Cibatu

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
51	SD Negeri Karyamekar	Negeri	Karyamekar	Cibatu
52	SD Negeri Wanawali	Negeri	Wanawali	Cibatu
53	SD Negeri 1 Cilingga	Negeri	Cilingga	Darangdan
	SD Negeri 2 Cilingga	Negeri	Cilingga	Darangdan
	SD Negeri 3 Cilingga	Negeri	Cilingga	Darangdan
54	SD Negeri 1 Darangdan	Negeri	Darangdan	Darangdan
	SDN 2 Darangdan	Negeri	Darangdan	Darangdan
55	SD Negeri 2 Depok	Negeri	Depok	Darangdan
	SD Negeri 4 Depok	Negeri	Depok	Darangdan
	SDN 1 Depok	Negeri	Depok	Darangdan
	SDN 3 Depok	Negeri	Depok	Darangdan
56	SD Negeri 1 Gunung Hejo	Negeri	Gununghejo	Darangdan
	SD Negeri 2 Gunung Hejo	Negeri	Gununghejo	Darangdan
57	SD Negeri Legoksari	Negeri	Legoksari	Darangdan
58	SD Negeri 1 Linggamukti	Negeri	Linggamukti	Darangdan
	SD Negeri 2 Linggamukti	Negeri	Linggamukti	Darangdan

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
59	SD Negeri 1 Linggasari	Negeri	Linggasari	Darangdan
	SDN 2 Linggasari	Negeri	Linggasari	Darangdan
60	SD Negeri 3 Mekarsari	Negeri	Mekarsari	Darangdan
	SDN 1 Mekarsari	Negeri	Mekarsari	Darangdan
	SDN 2 Mekarsari	Negeri	Mekarsari	Darangdan
61	SD Negeri 2 Nagrak	Negeri	Nagrak	Darangdan
	SDN 1 Nagrak	Negeri	Nagrak	Darangdan
	SDN 3 Nagrak	Negeri	Nagrak	Darangdan
62	SD Negeri 1 Nangewer	Negeri	Nangewer	Darangdan
	SD Negeri 2 Nangewer	Negeri	Nangewer	Darangdan
	SD Negeri 3 Nangewer	Negeri	Nangewer	Darangdan
63	SD Negeri 1 Neglasari	Negeri	Neglasari	Darangdan
	SD Negeri 2 Neglasari	Negeri	Neglasari	Darangdan
64	SD Negeri 1 Pasirangin	Negeri	Pasirangin	Darangdan
	SD Negeri 3 Pasirangin	Negeri	Pasirangin	Darangdan
	SDN 2 Pasirangin	Negeri	Pasirangin	Darangdan
65	SDN 1 Sadarkarya	Negeri	Sadarkarya	Darangdan

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SDN 2 Sadarkarya	Negeri	Sadarkarya	Darangdan
66	SD Negeri 1 Sawit	Negeri	Sawit	Darangdan
	SD Negeri 2 Sawit	Negeri	Sawit	Darangdan
67	SD Negeri Sirnamanah	Negeri	Sirnamanah	Darangdan
68	SDN 1 Bunder	Negeri	Bunder	Jatiluhur
	SDN 2 Bunder	Negeri	Bunder	Jatiluhur
	SDN 3 Bunder	Negeri	Bunder	Jatiluhur
69	SDN 1 Cibinong	Negeri	Cibinong	Jatiluhur
	SDN 2 Cibinong	Negeri	Cibinong	Jatiluhur
	SDN 3 Cibinong	Negeri	Cibinong	Jatiluhur
70	SDN 1 Cikaobandung	Negeri	Cikaobandung	Jatiluhur
	SDN 2 Cikaobandung	Negeri	Cikaobandung	Jatiluhur
	SDN 3 Cikaobandung	Negeri	Cikaobandung	Jatiluhur
	SDN 4 Cikaobandung	Negeri	Cikaobandung	Jatiluhur
	SDN 5 Cikaobandung	Negeri	Cikaobandung	Jatiluhur
71	SDN Cilegong	Negeri	Cilegong	Jatiluhur
	SDs Al Quran Al Huda	Swasta	Cilegong	Jatiluhur
72	SDN 1 Cisalada	Negeri	Cisalada	Jatiluhur

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SDN 2 Cisolada	Negeri	Cisolada	Jatiluhur
	SDN 3 Cisolada	Negeri	Cisolada	Jatiluhur
	SDN 4 Cisolada	Negeri	Cisolada	Jatiluhur
73	SDN 1 Jatiluhur	Negeri	Jatiluhur	Jatiluhur
	SDN 1 Kembangkuning	Negeri	Jatiluhur	Jatiluhur
	SDN 2 Jatiluhur	Negeri	Jatiluhur	Jatiluhur
	SDN 3 Jatiluhur	Negeri	Jatiluhur	Jatiluhur
74	SDN 1 Jatimekar	Negeri	Jatimekar	Jatiluhur
	SDN 2 Jatimekar	Negeri	Jatimekar	Jatiluhur
	SDs Tantina	Swasta	Jatimekar	Jatiluhur
75	SDN 2 Kembangkuning	Negeri	Kembangkuning	Jatiluhur
	SDN 3 Kembangkuning	Negeri	Kembangkuning	Jatiluhur
	SDN 4 Kembangkuning	Negeri	Kembangkuning	Jatiluhur
	SDN 5 Kembangkuning	Negeri	Kembangkuning	Jatiluhur
76	SD Al-Irfan Purwakarta	Swasta	Mekargalih	Jatiluhur
	SDN 1 Mekargalih	Negeri	Mekargalih	Jatiluhur
	SDN 2 Mekargalih	Negeri	Mekargalih	Jatiluhur

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
77	SDN 1 Parakanlima	Negeri	Parakanlima	Jatiluhur
	SDN 2 Parakanlima	Negeri	Parakanlima	Jatiluhur
78	SDN 1 Cibeber	Negeri	Cibeber	Kiarapedes
	SDN 2 Cibeber	Negeri	Cibeber	Kiarapedes
79	SDN 1 Ciracas	Negeri	Ciracas	Kiarapedes
80	SDN Gardu	Negeri	Gardu	Kiarapedes
81	SDN 1 Kiarapedes	Negeri	Kiarapedes	Kiarapedes
	SDN 2 Kiarapedes	Negeri	Kiarapedes	Kiarapedes
82	SDN 1 Margaluyu	Negeri	Margaluyu	Kiarapedes
	SDN 2 Margaluyu	Negeri	Margaluyu	Kiarapedes
83	SDN 1 Mekarjaya	Negeri	Mekarjaya	Kiarapedes
	SDN 2 Mekarjaya	Negeri	Mekarjaya	Kiarapedes
84	SDN 1 Parakan Garokgek	Negeri	Parakan Garokgek	Kiarapedes
	SDN 2 Parakan Garokgek	Negeri	Parakan Garokgek	Kiarapedes
85	SDN 1 Pusakamulya	Negeri	Pusakamulya	Kiarapedes
	SDN 2 Pusakamulya	Negeri	Pusakamulya	Kiarapedes
	SDN 3 Pusakamulya	Negeri	Pusakamulya	Kiarapedes

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
86	SDN Sumpersari	Negeri	Sumpersari	Kiarapedes
87	SDN TARINGGUL LANDEUH	Negeri	Taringgul Landeuh	Kiarapedes
88	SDN Cijati	Negeri	Cijati	Maniis
89	SDN 1 Ciramahilir	Negeri	Ciramahilir	Maniis
	SDN 2 Cirama Hilir	Negeri	Ciramahilir	Maniis
90	SDN 1 Citamiang	Negeri	Citamiang	Maniis
	SDN 2 Citamiang	Negeri	Citamiang	Maniis
91	SDN 1 Gunungkarung	Negeri	Gunungkarung	Maniis
	SDN 2 Gunungkarung	Negeri	Gunungkarung	Maniis
92	SDN Pasirjambu	Negeri	Pasirjambu	Maniis
93	SDN 1 Sinargalih	Negeri	Sinargalih	Maniis
	SDN 2 Sinargalih	Negeri	Sinargalih	Maniis
94	SDN 1 Sukamukti	Negeri	Sukamukti	Maniis
	SDN 2 Sukamukti	Negeri	Sukamukti	Maniis
	SDN 3 Sukamukti	Negeri	Sukamukti	Maniis
95	SDN 1 Tegaldatar	Negeri	Tegaldatar	Maniis
	SDN 2 Tegaldatar	Negeri	Tegaldatar	Maniis

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SDN 3 Tegaldatar	Negeri	Tegaldatar	Maniis
96	SDN Cidahu	Negeri	Cidahu	Pasawahan
97	SDN 1 Ciherang	Negeri	Ciherang	Pasawahan
	SDN 2 Ciherang	Negeri	Ciherang	Pasawahan
	SDN 3 Ciherang	Negeri	Ciherang	Pasawahan
98	SD Negeri Cihuni	Negeri	Cihuni	Pasawahan
99	SDN 2 Kertajaya	Negeri	Kertajaya	Pasawahan
	SDN 1 Kertajaya	Negeri	Kertajaya	Pasawahan
100	SDN 1 Lebak Anyar	Negeri	Lebakanyar	Pasawahan
	SDN 2 Lebak Anyar	Negeri	Lebakanyar	Pasawahan
	SDS IT Ali Bin Abi Thalib	Swasta	Lebakanyar	Pasawahan
101	SDN 1 Margasari	Negeri	Margasari	Pasawahan
	SDN 2 Margasari	Negeri	Margasari	Pasawahan
	SDN 3 Margasari	Negeri	Margasari	Pasawahan
102	SDN 1 Pasawahan	Negeri	Pasawahan	Pasawahan
	SDN 2 Pasawahan	Negeri	Pasawahan	Pasawahan
103	SDN Pasawahan Anyar	Negeri	Pasawahan Anyar	Pasawahan

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
104	SDN Pasawahan Kidul	Negeri	Pasawahankidul	Pasawahan
105	SDN Sawahkulon	Negeri	Sawah Kulon	Pasawahan
106	SDN 1 Selaawi	Negeri	Selaawi	Pasawahan
	SDN 2 Selaawi	Negeri	Selaawi	Pasawahan
	SDN 3 Selaawi	Negeri	Selaawi	Pasawahan
107	SD Negeri Warungkadu	Negeri	Warungkadu	Pasawahan
108	SDN 1 Anjun	Negeri	Anjun	Plered
	SDN 2 Anjun	Negeri	Anjun	Plered
109	SDN Babakansari	Negeri	Babakan Sari	Plered
110	SDN 1 Cibogogirang	Negeri	Cibogo Girang	Plered
	SDN 2 Cibogogirang	Negeri	Cibogo Girang	Plered
111	SDN 1 Cibogohilir	Negeri	Cibogohilir	Plered
	SDN 2 Cibogohilir	Negeri	Cibogohilir	Plered
	SDS IT Hidayatul Ghozzali	Swasta	Cibogohilir	Plered
112	SDN 1 Citeko	Negeri	Citeko	Plered
	SDN 2 Citeko	Negeri	Citeko	Plered
113	SDN Citekokaler	Negeri	Citekokaler	Plered

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
114	SDN 1 Gandamekar	Negeri	Gandamekar	Plered
	SDN 2 Gandamekar	Negeri	Gandamekar	Plered
115	SDN 1 Gandasoli	Negeri	Gandasoli	Plered
	SDN 2 Gandasoli	Negeri	Gandasoli	Plered
116	SDN 1 Linggarsari	Negeri	Linggarsari	Plered
117	SDN Liunggunung	Negeri	Liunggunung	Plered
118	SDN 1 Plered	Negeri	Plered	Plered
	SDN 2 Plered	Negeri	Plered	Plered
	SDN 3 Plered	Negeri	Plered	Plered
119	SDN Palinggihan	Negeri	Palinggihan	Plered
120	SDN 1 Pamoyanan	Negeri	Pamoyanan	Plered
	SDN 2 Pamoyanan	Negeri	Pamoyanan	Plered
121	SDN Rawasari	Negeri	Rawasari	Plered
122	SDN Sempur	Negeri	Sempur	Plered
123	SDN 1 Sindangsari	Negeri	Sindangsari	Plered
	SDN 2 Sindangsari	Negeri	Sindangsari	Plered
124	SD Negeri Bungurjaya	Negeri	Bungur Jaya	Pondok Salam

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
125	SD Negeri Galudra	Negeri	Galudra	Pondok Salam
126	SD Negeri Gurudug	Negeri	Gurudug	Pondok Salam
127	SD Negeri 1 Parakansalam	Negeri	Parakansalam	Pondok Salam
	SD Negeri 2 Parakansalam	Negeri	Parakansalam	Pondok Salam
128	SD Negeri 1 Pondokbungur	Negeri	Pondokbungur	Pondok Salam
	SD NEGERI 2 Pondokbungur	Negeri	Pondokbungur	Pondok Salam
129	SDN Salamjaya	Negeri	Salam Jaya	Pondok Salam
130	SDN Salammulya	Negeri	Salam Mulya	Pondok Salam
131	SD Negeri Salem	Negeri	Salem	Pondok Salam
132	SD Negeri Situ	Negeri	Situ	Pondok Salam
133	SD Negeri 1 Sukajadi	Negeri	Sukajadi	Pondok Salam
	SD Negeri 2 Sukajadi	Negeri	Sukajadi	Pondok Salam
134	SD N 1 Tanjungsari	Negeri	Tanjungsari	Pondok Salam
	SD Negeri 2 Tanjung Sari	Negeri	Tanjungsari	Pondok Salam
	SDN 3 Tanjungsari	Negeri	Tanjungsari	Pondok Salam
135	SDN 1 Cipaisan	Negeri	Cipaisan	Purwakarta
	SDN 2 Cipaisan	Negeri	Cipaisan	Purwakarta

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SDN 3 Cipaisan	Negeri	Cipaisan	Purwakarta
136	SDS Imam Ahmad Bin Hanbal	Swasta	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 1 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 2 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 3 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 4 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 5 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 6 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 7 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 8 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDN 9 Ciseureuh	Negeri	Ciseureuh	Purwakarta
	SDs Inklusi Sentra Salsabila	Swasta	Ciseureuh	Purwakarta
	SDS IT Al-Bina	Swasta	Ciseureuh	Purwakarta
	SDS Plus 2 Almuhajirin	Swasta	Ciseureuh	Purwakarta
	SDS IT Al Hikam	Swasta	Ciseureuh	Purwakarta
137	SDN 1 Citalang	Negeri	Citalang	Purwakarta
	SDN 2 Citalang	Negeri	Citalang	Purwakarta

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
138	SDN 1 Munjuljaya	Negeri	Munjuljaya	Purwakarta
	SDN 2 Munjuljaya	Negeri	Munjuljaya	Purwakarta
	SDN 3 Munjuljaya	Negeri	Munjuljaya	Purwakarta
	SDS IT An-Najah	Swasta	Munjuljaya	Purwakarta
	SDS Plus Mutiara Insani	Swasta	Munjuljaya	Purwakarta
139	SDN 1 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 10 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 2 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 3 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 4 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 5 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 6 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 7 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 8 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDN 9 Nagrikaler	Negeri	Nagrikaler	Purwakarta
	SDs Al-Ghozali	Swasta	Nagrikaler	Purwakarta
	SDS IT Cendekia	Swasta	Nagrikaler	Purwakarta

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SDS Laboratorium Upi	Swasta	Nagrikaler	Purwakarta
	SDS Plus 3 Al-Muhajirin	Swasta	Nagrikaler	Purwakarta
	SDS Plus Al Muhajirin	Swasta	Nagrikaler	Purwakarta
	SDS Kristen Pasundan	Swasta	Nagrikaler	Purwakarta
140	SD IT Nurul Hikmah III	Swasta	Nagrikidul	Purwakarta
	SDN 1 Nagrikidul	Negeri	Nagrikidul	Purwakarta
	SDN 2 Nagrikidul	Negeri	Nagrikidul	Purwakarta
	SDN 3 Nagrikidul	Negeri	Nagrikidul	Purwakarta
	SDN 4 Nagrikidul	Negeri	Nagrikidul	Purwakarta
	SDN 5 Nagrikidul	Negeri	Nagrikidul	Purwakarta
141	SDN 1 Nagritengah	Negeri	Nagritengah	Purwakarta
	SDN 2 Nagritengah	Negeri	Nagritengah	Purwakarta
	SDN 3 Nagritengah	Negeri	Nagritengah	Purwakarta
	SDS Rabbani Purwakarta	Swasta	Nagritengah	Purwakarta
	SDS Yos Sudarso	Swasta	Nagritengah	Purwakarta
142	SDN Purwamekar	Negeri	Purwamekar	Purwakarta
	SDS Plus Qurota Ayun	Swasta	Purwamekar	Purwakarta

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
143	SDN 1 Sindangkasih	Negeri	Sindangkasih	Purwakarta
	SDN 2 Sindangkasih	Negeri	Sindangkasih	Purwakarta
	SDN 3 Sindangkasih	Negeri	Sindangkasih	Purwakarta
	SDN 4 Sindangkasih	Negeri	Sindangkasih	Purwakarta
	SDN 5 Sindangkasih	Negeri	Sindangkasih	Purwakarta
	SDN 6 Sindangkasih	Negeri	Sindangkasih	Purwakarta
	SDS IT Ibnu Sina	Swasta	Sindangkasih	Purwakarta
	SDS Plus Al-Lutfi	Swasta	Sindangkasih	Purwakarta
144	SD IT Al Manar	Swasta	Tegalmunjul	Purwakarta
	SDN 1 Tegalmunjul	Negeri	Tegalmunjul	Purwakarta
	SDN 2 Tegalmunjul	Negeri	Tegalmunjul	Purwakarta
	SDN 3 Tegalmunjul	Negeri	Tegalmunjul	Purwakarta
145	SDN 1 Ciririp	Negeri	Ciririp	Sukasari
	SDN 2 Ciririp	Negeri	Ciririp	Sukasari
146	SDN Kertamanah	Negeri	Kertamanah	Sukasari
147	SDN 1 Kutamanah	Negeri	Kutamanah	Sukasari
	SDN 2 Kutamanah	Negeri	Kutamanah	Sukasari

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
148	SDN 1 Parung Banteng	Negeri	Parungbanteng	Sukasari
	SDN 2 Parung Banteng	Negeri	Parungbanteng	Sukasari
149	SD Negeri 1 Sukasari	Negeri	Sukasari	Sukasari
	SDN 2 Sukasari	Negeri	Sukasari	Sukasari
	SDN 3 Sukasari	Negeri	Sukasari	Sukasari
150	SD Negeri 3 Cianting	Negeri	Cianting	Sukatani
	SDN 1 Cianting	Negeri	Cianting	Sukatani
	SDN 2 Cianting	Negeri	Cianting	Sukatani
151	SDN 1 Cianting Utara	Negeri	Cianting Utara	Sukatani
	SDN 2 Cianting Utara	Negeri	Cianting Utara	Sukatani
152	SD Negeri Cibodas	Negeri	Cibodas	Sukatani
153	SDN Cijantung	Negeri	Cijantung	Sukatani
154	SDN Cilalawi	Negeri	Cilalawi	Sukatani
155	SDN Cipicung	Negeri	Cipicung	Sukatani
156	SDN 1 Malangnengah	Negeri	Malangnengah	Sukatani
	SDN 2 Malangnengah	Negeri	Malangnengah	Sukatani
157	SD Negeri 3 Panyindangan	Negeri	Panyindangan	Sukatani

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SD NEGERI 4 PANYINDANGAN	Negeri	Panyindangan	Sukatani
	SDN 1 Panyindangan	Negeri	Panyindangan	Sukatani
	SDN 2 Panyindangan	Negeri	Panyindangan	Sukatani
158	SDN 1 Pasirmunjul	Negeri	Pasirmunjul	Sukatani
	SDN 2 Pasirmunjul	Negeri	Pasirmunjul	Sukatani
159	SD Negeri 2 Sindanglaya	Negeri	Sindanglaya	Sukatani
	SDN 1 Sindanglaya	Negeri	Sindanglaya	Sukatani
160	SD Negeri 3 Sukajaya	Negeri	Sukajaya	Sukatani
	SDN 1 Sukajaya	Negeri	Sukajaya	Sukatani
	SDN 2 Sukajaya	Negeri	Sukajaya	Sukatani
161	SD Negeri Sukamaju	Negeri	Sukamaju	Sukatani
162	SDN 1 Sukatani	Negeri	Sukatani	Sukatani
	SDN 2 Sukatani	Negeri	Sukatani	Sukatani
	SDN 3 Sukatani	Negeri	Sukatani	Sukatani
	SDN 4 Sukatani	Negeri	Sukatani	Sukatani
163	SD Negeri 2 Tajursindang	Negeri	Tajursindang	Sukatani

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SD Negeri 3 Tajursindang	Negeri	Tajursindang	Sukatani
	SD Negeri 4 Tajursindang	Negeri	Tajursindang	Sukatani
	SDN 1 Tajursindang	Negeri	Tajursindang	Sukatani
164	SDN 1 Batutumpang	Negeri	Batutumpang	Tegalwaru
	SDN 2 Batutumpang	Negeri	Batutumpang	Tegalwaru
	SDN 3 Batutumpang	Negeri	Batutumpang	Tegalwaru
165	SDN Cadasmekar	Negeri	Cadasmekar	Tegalwaru
166	SDN 1 Cadassari	Negeri	Cadassari	Tegalwaru
	SDN 2 Cadassari	Negeri	Cadassari	Tegalwaru
167	SDN 1 Cisarua	Negeri	Cisarua	Tegalwaru
	SDN 2 Cisarua	Negeri	Cisarua	Tegalwaru
	SDN 3 Cisarua	Negeri	Cisarua	Tegalwaru
168	SDN 1 Citalang	Negeri	Citalang	Tegalwaru
	SDN 2 Citalang	Negeri	Citalang	Tegalwaru
169	SDN Galumpit	Negeri	Galumpit	Tegalwaru
170	SDN 1 Karoya	Negeri	Karoya	Tegalwaru
	SDN 2 Karoya	Negeri	Karoya	Tegalwaru

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
171	SDN 1 Pasanggrahan	Negeri	Pasanggrahan	Tegalwaru
	SDN 2 Pasanggrahan	Negeri	Pasanggrahan	Tegalwaru
172	SDN Sukahaji	Negeri	Sukahaji	Tegalwaru
173	SDN 1 Sukamulya	Negeri	Sukamulya	Tegalwaru
	SDN 2 Sukamulya	Negeri	Sukamulya	Tegalwaru
	SDN 3 Sukamulya	Negeri	Sukamulya	Tegalwaru
174	SDN 1 Tegalsari	Negeri	Tegalsari	Tegalwaru
	SDN 2 Tegalsari	Negeri	Tegalsari	Tegalwaru
175	SDN Tegalwaru	Negeri	Tegalwaru	Tegalwaru
176	SDN 1 Warungjeruk	Negeri	Warungjeruk	Tegalwaru
	SDN 2 Warungjeruk	Negeri	Warungjeruk	Tegalwaru
177	SDN 1 Babakan	Negeri	Babakan	Wanayasa
	SDN 2 Babakan	Negeri	Babakan	Wanayasa
178	SDN Ciawi	Negeri	Ciawi	Wanayasa
179	SDN 1 Cibuntu	Negeri	Cibuntu	Wanayasa
	SDN 2 Cibuntu	Negeri	Cibuntu	Wanayasa
180	SDN Legokhuni	Negeri	Legokhuni	Wanayasa

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
181	SDN Nagrog	Negeri	Nagrog	Wanayasa
182	SD Negeri 1 Nangerang	Negeri	Nangerang	Wanayasa
		Negeri	Simpang	Wanayasa
	SD Negeri 2 Nangerang	Negeri	Nangerang	Wanayasa
		Negeri	Simpang	Wanayasa
183	SDN Raharja	Negeri	Raharja	Wanayasa
		Negeri	Simpang	Wanayasa
184	SDN Sakambang	Negeri	Sakambang	Wanayasa
185	SD Negeri Sukadami	Negeri	Sukadami	Wanayasa
186	SDN Sumurugul	Negeri	Sumurugul	Wanayasa
187	SD Negeri Taringgul Tengah	Negeri	Taringgul Tengah	Wanayasa
	SD Plus Al Islam	Swasta	Taringgul Tengah	Wanayasa
188	SD Negeri 1 Taringgul Tonggoh	Negeri	Taringgul Tonggoh	Wanayasa
	SD Negeri 2 Taringgul Tonggoh	Negeri	Taringgul Tonggoh	Wanayasa
189	SDN 1 Wanasari	Negeri	Wanasari	Wanayasa
	SDN 2 Wanasari	Negeri	Wanasari	Wanayasa
190	SD Negeri 1 Wanayasa	Negeri	Wanayasa	Wanayasa

Zona	Nama Satuan Pendidikan	Status	Desa	Kecamatan
	SD Negeri 2 Wanayasa	Negeri	Wanayasa	Wanayasa
	SD IT Al-Akhyar	Swasta	Wanayasa	Wanayasa
	SDN 3 Wanayasa	Negeri	Wanayasa	Wanayasa
	SDS Al-Qalam	Negeri	Wanayasa	Wanayasa



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN 2024 PELAJARAN BARU DI
 KABUPATEN PURWAKARTA

WILAYAH ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Zona	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status	Kecamatan
1	SMPN 2 Babakancikao	20217395	Negeri	Babakancikao
	SMPN 3 Babakancikao	20217391	Negeri	Babakancikao
	SMPS AL Barokah	20271620	Swasta	Babakancikao
	SMPN 1 Babakancikao	20217344	Negeri	Babakancikao
	SMPS IT Nurul Ihsan	69971020	Swasta	Babakancikao
2	SMPN Satap Terpadu Cileunca	20269438	Negeri	Bojong
	SMPN 3 Bojong	60726672	Negeri	Bojong
	SMPN 2 Bojong	20229616	Negeri	Bojong
	SMPSI Maarif Nu Al-Fatih	70005302	Swasta	Bojong
	SMPN 1 Bojong	20217346	Negeri	Bojong
3	SMPN 1 Bungursari	20217347	Negeri	Bungursari
	SMPN 2 Bungursari	20217396	Negeri	Bungursari
	SMP Tunas Bukit Indah	20229741	Swasta	Bungursari
	SMPS Awi Mekar Hade Akar (AMHA)	70024346	Swasta	Bungursari
4	SMPS IT Al-Muchtar	70005777	Swasta	Campaka
	SMP Negeri 1 Campaka	20217348	Negeri	Campaka
	SMP Alfiah Nahdlatul Ulama	69947409	Swasta	Campaka
	SMP Plus Ar-Raudhah	69900209	Swasta	Campaka

Zona	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status	Kecamatan
	SMP Negeri 2 Campaka	20217397	Negeri	Campaka
	SMPN 3 Campaka	20269618	Negeri	Campaka
5	SMPN 2 Cibatu	20217398	Negeri	Cibatu
	SMP Negeri 1 Cibatu	20217349	Negeri	Cibatu
	SMPN 3 Cibatu	20252002	Negeri	Cibatu
6	SMPN Satu Atap Cilingga	20229604	Negeri	Darangdan
	SMP Negeri 1 Darangdan	20217350	Negeri	Darangdan
	SMP Negeri 6 Darangdan	20217385	Negeri	Darangdan
	SMPN Satu Atap Terpadu 1 Gunung Hejo	69849372	Negeri	Darangdan
	SMP Negeri 3 Darangdan	20217375	Negeri	Darangdan
	SMP Negeri 2 Darangdan	20217399	Negeri	Darangdan
	SMP Negeri 5 Darangdan	20217383	Negeri	Darangdan
	SMP Negeri 4 Darangdan	20217381	Negeri	Darangdan
7	SMPN Satu Atap Terpadu Cibinong	69757926	Negeri	Jatiluhur
	SMPN 1 Jatiluhur	20217351	Negeri	Jatiluhur
	SMPN Satu Atap Terpadu 5 Kembangkuning	69849555	Negeri	Jatiluhur
	SMPN Satu Atap Terpadu Parakanlima	20229608	Negeri	Jatiluhur
8	SMP Negeri 1 Kiarapedes	20217352	Negeri	Kiarapedes
	SMP Negeri Satu Atap Margaluyu	20229727	Negeri	Kiarapedes
	SMP Negeri 2 Kiarapedes	20229617	Negeri	Kiarapedes
9	SMP Negeri 2 Maniis	20217401	Negeri	Maniis
	SMP Negeri 1 Maniis	20217353	Negeri	Maniis
	SMPS Nasional	70003990	Swasta	Maniis

Zona	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status	Kecamatan
	SMPN Satu Atap Terpadu 1 Sukamukti	20229611	Negeri	Maniis
	SMPN Satu Atap Terpadu 1 Tegaldatar	20269428	Negeri	Maniis
	SMPS IT Al-Luthfi	70030338	Swasta	Maniis
10	SMP Negeri 3 Pasawahan	20271275	Negeri	Pasawahan
	SMP Terpadu Al-Muridiyah	69830456	Swasta	Pasawahan
	SMP Islam Al-Ghozali	69970066	Swasta	Pasawahan
	SMP Negeri 1 Pasawahan	20217354	Negeri	Pasawahan
	SMP Negeri 2 Pasawahan	20217402	Negeri	Pasawahan
	SMPS Plus Ahsani Taqwim	70037473	Swasta	Pasawahan
	SMPS IT Assyafaq	70024290	Swasta	Pasawahan
11	SMP IT Darussalam	69980186	Swasta	Plered
	SMP IT Hidayatul Ghozzali	69949111	Swasta	Plered
	SMPN Satu Atap Terpadu 1 Linggarsari	20269431	Negeri	Plered
	SMP Negeri 1 Plered	20217372	Negeri	Plered
	SMP BP Al Muthohhar	69949114	Swasta	Plered
	SMP Negeri 2 Plered	20229618	Negeri	Plered
	SMPN Satu Atap Terpadu 2 Pamoyanan	20269442	Negeri	Plered
	SMPN Satu Atap Terpadu Rawasari	20270074	Negeri	Plered
	SMP Islam Al-Azhar	69970065	Swasta	Plered
	SMP BP Minnatulhuda	70040925	Swasta	Plered
12	SMPN SATU ATAP BUNGURJAYA	20253316	Negeri	Pondok Salam
	SMPS IT Yaa Bunayya	70003804	Swasta	Pondok Salam
	SMP Negeri 1	20217373	Negeri	Pondok Salam

Zona	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status	Kecamatan
	Pondoksalam			
	SMP NEGERI 2 PONDOKSALAM	20217403	Negeri	Pondok Salam
	SMPS ISLAMIC BOARDING SCHOOL KIAI DEMAK	70029386	Swasta	Pondok Salam
13	SMP Al Islam	20229725	Swasta	Purwakarta
	SMP Negeri 5 Purwakarta	20217384	Negeri	Purwakarta
	SMP IT Al-Bina	69949997	Swasta	Purwakarta
	SMPN 10 Purwakarta	69964402	Negeri	Purwakarta
	SMPN 2 Purwakarta	20217404	Negeri	Purwakarta
	SMPS 2 Al-Muhajirin	69786624	Swasta	Purwakarta
	SMP Negeri 9 Purwakarta	20229733	Negeri	Purwakarta
	SMP Negeri 4 Purwakarta	20217382	Negeri	Purwakarta
	SMP Negeri 7 Purwakarta	20217387	Negeri	Purwakarta
	SMP IT Cendekia	69970963	Swasta	Purwakarta
	SMPS Al Muhajirin	20229726	Swasta	Purwakarta
	SMPS Plus Al-Hidayah	70006954	Swasta	Purwakarta
	SMP Pasundan	20217340	Swasta	Purwakarta
	SMPN 1 Purwakarta	20217374	Negeri	Purwakarta
	SMP Negeri 3 Purwakarta	20217377	Negeri	Purwakarta
	SMPS PGRI Purwakarta	20217341	Swasta	Purwakarta
	SMPS Talenta	69979686	Swasta	Purwakarta
	SMPS Ibnu Sina	20217355	Swasta	Purwakarta
SMP Negeri 6	20217386	Negeri	Purwakarta	

Zona	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status	Kecamatan
	Purwakarta			
	SMP Negeri 8 Purwakarta	20229732	Negeri	Purwakarta
	SMPS Insan Cita	70002899	Swasta	Purwakarta
	SMPS Inklusi Salsabila	70025618	Swasta	Purwakarta
	SMPS Islam Lazuardi Ideal	70012833	Swasta	Purwakarta
	SMPS Science Mutiara Insani	70027435	Swasta	Purwakarta
14	SMP Negeri 1 Sukasari	20217392	Negeri	Sukasari
	SMP Terpadu 2 Kutamanah	69786768	Negeri	Sukasari
	SMPN Satu Atap Kutamanah	20229605	Negeri	Sukasari
	SMP Negeri Satu Atap Parung Banteng 1	20280585	Negeri	Sukasari
	SMPN Satu Atap 2 Parungbanteng	20229609	Negeri	Sukasari
	SMPN 2 Sukasari	69849567	Negeri	Sukasari
15	SMP Negeri 4 Sukatani	20229731	Negeri	Sukatani
	SMP Negeri Satu Atap Panyindangan	20229607	Negeri	Sukatani
	SMP Negeri Satu Atap Pasir Munjul	20229610	Negeri	Sukatani
	SMP Negeri 2 Sukatani	20217405	Negeri	Sukatani
	SMP 3 Al-Muhajirin	69946570	Swasta	Sukatani
	SMP Negeri 3 Sukatani	20217378	Negeri	Sukatani
	SMP Negeri 1 Sukatani	20217393	Negeri	Sukatani
SMP Negeri Satu Atap Tajursindang	20271037	Negeri	Sukatani	
16	SMP Negeri 1 Tegalwaru	20217394	Negeri	Tegalwaru

Zona	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status	Kecamatan
	SMPN Satu Atap Terpadu 1 Cadassari	69849570	Negeri	Tegalwaru
	SMP Negeri 3 Tegalwaru	20271186	Negeri	Tegalwaru
	SMP Unggulan Baitul Quran Cirata	69975625	Swasta	Tegalwaru
	SMPN Satu Atap Terpadu 2 Pasanggrahan	69849544	Negeri	Tegalwaru
	SMP Negeri 2 Tegalwaru	20217406	Negeri	Tegalwaru
	SMPS Ikadi	70000179	Swasta	Tegalwaru
	SMP Islam Terpadu Babussalam	69816312	Swasta	Tegalwaru
	SMPN Satu Atap Terpadu 1 Warungjeruk	69849536	Negeri	Tegalwaru
17	SMP Al-Badar Cipulus	69946806	Swasta	Wanayasa
	SMP Islam Al-Kautsar	69949994	Swasta	Wanayasa
	SMP Negeri 1 Wanayasa	20229728	Negeri	Wanayasa
	SMP Negeri 2 Wanayasa	20229619	Negeri	Wanayasa
	SMP Negeri Satu Atap Ciawi	20269980	Negeri	Wanayasa
	SMPN Satu Atap Terpadu Nagrog	69849561	Negeri	Wanayasa
	SMPS Al-Badar 2 Cipulus	70003832	Swasta	Wanayasa
	SMPS IT Al Asyariyah	70005878	Swasta	Wanayasa



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
 KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN 2024 PELAJARAN BARU DI
 KABUPATEN PURWAKARTA

PENSKORAN PRESTASI

NO	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ATAU KEMENTERIAN AGAMA	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara 1 International	100	95
2.	Juara 2 International	90	85
3.	Juara 3 International	80	75
4.	Juara 1 Nasional	75	70
5.	Juara 2 Nasional	65	60
6.	Juara 3 Nasional	55	50
7.	Juara 1 Provinsi	50	45
8.	Juara 2 Provinsi	45	40
9.	Juara 3 Provinsi	40	35
10.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	30	25
11.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	20	15
12.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	10	5

NO	TINGKAT KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG/ KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara 1 International	90	85
2.	Juara 2 International	83	80
3.	Juara 3 International	76	75
4.	Juara 1 Nasional	65	60
5.	Juara 2 Nasional	58	55
6.	Juara 3 Nasional	51	45
7.	Juara 1 Provinsi	40	35
8.	Juara 2 Provinsi	33	30
9.	Juara 3 Provinsi	30	25
10.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	20	15
11.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	14	10
12.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	7	3

NO	PENGHARGAAN GIAT KEPRAMUKAAN	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Piagam Pramuka Garuda	75	
2.	Juara 1 Lomba Tingkat V (Nasional)		70
3.	Juara 2 Lomba Tingkat V		60
4.	Juara 3 Lomba Tingkat V		65
5.	Partisipasi Kegiatan JAMBORE (JAMBORE Dunia/ ASEAN/ Nasional)	75	
6.	Juara 1 Lomba Tingkat IV (Provinsi)		45
7.	Juara 2 Lomba Tingkat IV		40
8.	Juara 3 Lomba Tingkat IV		35
9.	Partisipasi Kegiatan Provinsi/ Kegiatan Kwartir Daerah	50	
10.	Juara 1 Lomba Tingkat III/ Lomba Kwarcab lainnya (Kab/ Kota)		25
11.	Juara 2 Lomba Tingkat III/ Lomba Kwarcab lainnya		15
12.	Juara 3 Lomba Tingkat III/ Lomba Kwarcab lainnya		5
13.	Partisipasi Kab/ Kota/ Keqiata Kwartir Cabang		20

NO	PENGHARGAAN GIAT LITERASI	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Piagam Duta Literasi	80	
2.	Piagam Penulis Aktif	80	
3.	Piagam Penulis Aktif		50
4.	Piagam Dokter Kecil	50	
5.	Piagam Polisi Cilik	50	
6.	Kecerdasan dan/atau bakat istimewa	50	
7.	Keterampilan khusus	50	

AGAMA ISLAM

NO.	KECAKAPAN HAFIDZ AL QUR'AN	SKOR
1.	30 Juz	100
2.	29 Juz	97
3.	28 Juz	94
4.	27 Juz	91
5.	26 Juz	88
6.	25 Juz	85
7.	24 Juz	82

NO.	KECAKAPAN HAFIDZ AL QUR'AN	SKOR
8.	23 Juz	79
9.	22 Juz	76
10.	21 Juz	73
11.	20 Juz	70
12.	19 Juz	67
13.	18 Juz	64
14.	17 Juz	61
15.	16 Juz	58
16.	15 Juz	55
17.	14 Juz	52
18.	13 Juz	49
19.	12 Juz	46
20.	11 Juz	43
21.	10 Juz	40
22.	9 Juz	37
23.	8 Juz	34
24.	7 Juz	31
25.	6 Juz	28

NO.	KECAKAPAN HAFIDZ AL QUR'AN	SKOR
26.	5 Juz	25
28.	4 Juz	22
29.	3 Juz	19
30.	2 Juz	16
31.	1 Juz	13

AGAMA KRISTEN

NO.	KECAKAPAN HAFALAN ALKITAB	SKOR
1	Pengakuan Iman Rasuli	40
2	Hukum Kasih	30
3	Doa Bapa Kami	20
4	10 Perintah Tuhan	10

AGAMA HINDU

NO.	KECAKAPAN KITAB	SKOR
1	Yoga - Meditasi	50
2	Baca Sloka Weda dengan guru lagu yang sesuai	40
3	Mantram Panca Sembah	30

NO.	KECAKAPAN KITAB	SKOR
4	Mantram doa Tri Shandya	20
5	Sikap Sembayang yang sempurna	10

AGAMA KATHOLIK

NO.	KECAKAPAN BACA TULIS KITAB SUCI DAN HAFALAN DOA	SKOR
1	Doa Rosario	50
2	Baca & Tulis Injil Sinoptik (Matius, Markus, Lukas, Yohanes)	40
3	Hafalan Nabi-Nabi, 12 Rasul, Surat-Surat Paulus	30
4	Mengikuti Perayaan Ekaristi	20
5	Doa Malaikat Tuhan	10

AGAMA BUDHA

NO.	KECAKAPAN LAFALAN TRIPITAKA	SKOR
1	Dhammapada	40
2	Paritta, Sutra, Mantra	30
3	Sikap Pūjā dalam agama Buddha	20
4	Dhammagita	10

AGAMA KONGHUCHU

NO.	KECAKAPAN KITAB SUCI SI SHU DAN HAFALAN DOA	SKOR
1	Sikap Sembahyang & menghormat yang benar	50
2	Cing coo (duduk diam)	40
3	Doa pembukaan	30
4	Doa Penutup	20
5	Doa ucapan syukur	10

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN